

## **Sragen di Masa Revolusi: Dampak Sosial dan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta, 1944-1949**

**Syammy Lilyana, Humaidi, Muhammad Hasmi Yanuardi.**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Email: [syammylilyana97@gmail.com](mailto:syammylilyana97@gmail.com)

**Abstract:** *This article aims to explain about Sragen which was originally part of the Swapraja Surakarta then opted out of the Swapraja Surakarta bond after the Proclamation of Independence and become part of the Central Government of the Republic of Indonesia, and explain about social impact and process of the revolution as a result of events that occurred in Sragen and surrounding areas. Based on the results of this study, it can be concluded that among the big cities in Central Java, such as Surakarta and Semarang, Sragen is considered a small city. Sragen can be said as a city that follows the events that occurred in Surakarta. Sometimes, even Sragen people refer to themselves as Surakarta or Solo people. This shows that Sragen in the sense of mentality is still rooted in the big city which is the center of its culture, Surakarta. This also happened in the early independence period where most everything that happened in Sragen was a result of the turmoil that occurred in Surakarta. The social upheavals that emerged showed that the Indonesian revolution was not only a form of the struggle of the Indonesian nation to maintain its new identity, but also contains social problems in it.*

**Keywords:** *Social Impact, Revolution, Sragen*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Sragen yang awalnya merupakan bagian dari Swapraja Surakarta yang kemudian memilih keluar dari ikatan Swapraja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan dan menjadi bagian dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia, serta menjelaskan dampak sosial dan proses jalannya revolusi akibat dari adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Sragen dan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di antara kota-kota besar yang tersebar di Jawa Tengah seperti, Surakarta dan Semarang, Sragen dianggap sebagai kota kecil. Sragen dapat dikatakan sebagai kota yang mengekor kepada apa yang terjadi di Surakarta. Bahkan orang Sragen sendiri kadang menyebut diri mereka sebagai orang Surakarta atau Solo. Hal ini menunjukkan bahwa Sragen dalam artian mentalitas masih menginduk kepada kota besar yang menjadi sentral kebudayaannya yaitu, Surakarta. Hal ini juga yang kemudian terjadi pada masa awal kemerdekaan di mana kebanyakan setiap hal yang terjadi di Sragen merupakan akibat dari gejolak yang terjadi di Surakarta. Pergolakan-pergolakan sosial yang muncul memperlihatkan bahwa revolusi Indonesia tidak hanya merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan identitas barunya tetapi, juga mengandung permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya.

**Kata kunci:** Dampak Sosial, Revolusi, Sragen

## PENDAHULUAN

Pada masa Hindia Belanda, Surakarta menduduki wilayah yang disebut dengan *Vorstenlanden* yang berarti tanah raja-raja atau dapat disebut dengan Daerah Kerajaan Jawa. *Vorstenlanden* merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua karesidenan. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kasunanan Surakarta milik Susuhunan Pakubuwana dan Mangkunegaran milik Pangeran Mangkunegara. Karesidenan Surakarta ini terdiri dari Kabupaten Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri (Larson, 1990: 1).

Pada awal kedatangan Jepang dirasakan bahwa Jepang sangat berpengaruh, ditandai ketika Dr. Soetomo berpidato di hadapan kaum bangsawan dan mengajak mereka dalam kedudukannya sebagai ksatria, prajurit, aristokrasi Indonesia untuk berusaha menandingi samurai yang merupakan “obor” bagi bangsa Jepang (*Ibid*, 279). Hal ini memunculkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda karena pemerintah kolonial menangkap tanda-tanda yang menarik perhatian bahwa Jepang menempatkan penguasa-penguasa tradisional Surakarta sebagai pusat perhatian.

Berbagai pendekatan yang dilakukan Jepang terhadap pemerintahan Surakarta merupakan sebuah strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada di Surakarta. Pemerintahan militer berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada, dan meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjadikannya pusat persediaan makanan (Sutarno, 1997: 18).

Jepang juga melakukan perubahan dalam administrasi dan pemerintahan. Dilakukan pertemuan antara militer Jepang dengan Susuhunan Pakubuwana XI dan Pangeran Mangkunegara VII untuk mengumumkan bahwa daerah Surakarta prinsipnya berstatus seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Militer Jepang melaksanakan politiknya di Surakarta, diantaranya dengan membangkitkan perasaan rakyat Surakarta untuk anti Belanda, hal-hal yang

berbau Belanda untuk tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti, berbicara bahasa Belanda, menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, sampai toko-toko yang menggunakan papan nama bahasa Belanda harus diganti.

Proklamasi kemerdekaan telah melahirkan pemerintahan yang baru menggantikan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang, dengan lahirnya pemerintahan baru ini menjadikan Indonesia memasuki periode revolusi. Bangsa Indonesia memulai fase revolusi sejak Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945 (Kahin, 1995: 174-175). Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan tidak hanya merupakan suatu kisah utama dalam sejarah Indonesia namun juga merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri (Rickelfs, 1999: 317)

Pembentukan pemerintahan di Surakarta setelah Proklamasi didasarkan pada proses pelebagaan negara yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proses pelebagaan negara tersebut berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memilih Sukarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Kahin, 1995: 177). Terbentuknya KNIP diikuti dengan pembentukan KNI Daerah (KNID). Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta mengambil seluruh kekuasaan yang dibawah oleh Jepang, hal tersebut menjadikan bahwa pemerintahan di Surakarta dikendalikan oleh KNID.

Suatu revolusi terjadi karena ledakan kekuatan-kekuatan yang menghendaki perubahan-perubahan sosial dan politik, atau ledakan aspirasi yang telah sekian lama tertekan dan tertimbun, naik dan meledak ke permukaan. Oleh karena itu, sifat revolusi biasanya disertai pula dengan tindak kekerasan, huru-hara, sampai tindak anarki. Tindak kekerasan yang sangat menonjol dalam suatu revolusi ini adalah akibat dari tidak berfungsinya sistem sosial, karena penguasa menentang perubahan-perubahan.

Gejolak revolusi yang terjadi tidak hanya tentang perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan identitas barunya namun juga mencakup mengenai

permasalahan-permasalahan sosial. Dampak sosial yang dialami masyarakat dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari akibat terjadinya revolusi yang menjadikan fokus teralihkan kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Munculnya tindakan kriminalitas sampai masalah pendidikan merupakan bukti dari permasalahan sosial yang dialami masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih permasalahan pada konteks topik penelitian tersebut dengan beberapa alasan. Pertama, penulis merasa penelitian tentang Kota Sragen masih sedikit, terutama mengenai kejadian-kejadian pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dimana situasi sosial, ekonomi, dan politik mengambil andil untuk kemunculan revolusi di wilayah-wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah khususnya Kota Sragen.

Kedua, pembahasan mengenai Kota Sragen yang tersedia hanya membicarakan pembentukan-pembentukan laskar ketika terjadinya revolusi itu sendiri, tetapi tidak menguraikan apa yang terjadi secara aksi dan reaksi terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Kajian ini disampaikan dalam buku berjudul *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal* karya Nurdiyanto. Alasan terakhir karena penulis memiliki kedekatan emosional sebagai orang yang dibesarkan di Kota Sragen, sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan semacam kajian khusus mengenai Sragen.

## **METODE**

Penelitian ini membahas tentang sejarah Kota Sragen pada masa revolusi yang difokuskan kepada dampak sosial dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penelitian Sejarah Indonesia masa revolusi merupakan rangkaian proses dari terbentuknya Republik Indonesia seperti sekarang. Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah mempunyai lima tahapan yaitu, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan penulisan (Kuntowijoyo, 1995: 69).

Tahap awal penelitian skripsi ini setelah pemilihan topik untuk diteliti adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder sebagai sumber penulisan. Tahap kedua yang dilakukan adalah verifikasi data. Bahan-bahan penulisan yang

sudah didapatkan dari berbagai sumber akan dikaji dan dikritik baik secara intern maupun ekstern dalam rangka untuk memastikan keaslian serta keakuratan data-data yang terdapat dalam bahan-bahan penelitian skripsi ini, sehingga didapatkan fakta-fakta yang mendukung penelitian. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dalam proses interpretasi, fakta-fakta yang sudah diperoleh penulis disusun sesuai dengan urutan kejadian dan kemudian dianalisis hubungan dari fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menjadi suatu rangkaian deskripsi tulisan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Pada tahap akhir yaitu, penulisan atau historiografi, penulis merangkai fakta yang telah diinterpretasikan menjadi sebuah deskripsi tulisan yang ditulis secara ilmiah dan tersusun secara kronologis sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengenal kota-kota yang tersebar di Jawa Tengah, Sragen merupakan kota kecil diantara kota-kota besar seperti, Surakarta dan Semarang. Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan sebelah utara, Kabupaten Ngawi sebelah timur, Kabupaten Karanganyar sebelah selatan, dan Kabupaten Boyolali sebelah barat. Kondisi geografis wilayah Sragen yang dibatasi dengan Sungai Bengawan Solo menjadikan perbedaan antara dua bagian, pada bagian utara Sungai Bengawan Solo merupakan daerah pegunungan kapur yang tandus, mengarahkan penduduknya pada kegiatan berkebun, berdagang, dan industry pengolahan. Sedangkan pada bagian selatan Sungai Bengawan Solo merupakan daerah subur yang terdiri dari dataran rendah dan mengarahkan kegiatannya pada sentra pertanian dan tanaman pangan.

Sragen yang mengindik kepada Kota Surakarta menjadikan wilayahnya terkena dampak dari peristiwa yang terjadi di Surakarta. Hal tersebut ditandai dengan keberadaan Sragen pada masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang masih di bawah ikatan Swapraja Surakarta, baru ketika Proklamasi Kemerdekaan, Sragen dan wilayah lain yang berada di wilayah Swapraja Surakarta menuntut agar bisa melepaskan diri dari ikatan tersebut. Faktor yang mendukung hal

tersebut karena adanya persepsi dari masyarakat bahwa anggota kraton masih mengharapkan kedatangan Belanda lagi.

Perkembangan ke arah kejatuhan pemerintahan Swapraja semakin dekat, akibat persaingan politik nasional antara Pemerintah Kabinet Sjahrir dengan oposisi Persatuan Perjuangan dirasakan sangat besar di Surakarta. Razia-razia yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Maret 1946 terhadap para pemimpin Persatuan Perjuangan dijawab dalam bulan-bulan April dan Mei oleh penentangan yang semakin militan dan bersifat “revolusi sosial” di daerah Surakarta. Pada tanggal 19 April 1946, Barisan Banteng dan unsur-unsur pemuda lainnya menerobos ke dalam Keraton dan memaksa Susuhunan menyatakan kesediannya untuk menyerahkan wewenangnya kepada rakyat (Anderson, 1988: 390).

Adanya konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan dasar dalam pemerintahan kerajaan dengan kelompok yang tetap mempertahankan pemerintahan tradisional memunculkan Gerakan Anti Swapraja (GAS). Swapraja sendiri berarti suatu wilayah yang mendapatkan hak memerintah sendiri dalam bentuk kerajaan, sehingga memberi kekuasaan yang luas kepada raja dan aparatnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Bentuk Swapraja ini adalah kelanjutan dari bentuk *Vorstenlanden* yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada Surakarta. Hal ini membuat kaum revolusioner menganggap pengesahan pemerintah Swapraja sama saja dengan mempertahankan sistem kerajaan yang memberikan hak-hak khusus kepada kaum bangsawan di dalam masyarakat (Darmansyah, 1995: 10-11).

Gerakan Anti Swapraja (GAS) banyak melakukan perlawanan-perlawanan, puncaknya adalah saat Papatih Dalem Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh kelompok GAS. Aksi tersebut diikuti dengan pencopotan bupati-bupati yang umumnya masih kerabat raja dan digantikan oleh orang-orang yang mendukung GAS. Pada Maret 1946, Papatih Dalem yang baru juga diculik dan dibunuh. Pada April 1946, Gerakan Anti Swapraja mencari dukungan ke daerah-daerah kabupaten wilayah Surakarta. Pengaruh anti Swapraja di Sragen, mula-mula diterima oleh partai-partai politik, yang kemudian masuk ke kalangan badan-badan perjuangan (Nurdiyanto, 2013: 97).

Pengaruh anti Swapraja menyebabkan wilayah-wilayah di bawah pemerintahan Surakarta ikut bergabung karena menginginkan pembubaran pemerintahan Mangkunegaran dan Susuhunan yang sering terjadi pertentangan antara kelompok yang mengharapkan perubahan dasar dalam pemerintahan kerajaan dan kelompok yang tetap mempertahankan birokrasi tradisional. Pada akhirnya, hal tersebut membuat banyaknya daerah-daerah, salah satunya Kota Sragen, yang pada tanggal 27 April 1946 melepaskan diri dari pemerintahan Surakarta dan bergabung dengan pemerintahan pusat Republik Indonesia sebagai pernyataan rasa persatuan dan kesetiaan.

Setelah memutuskan untuk berhubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia, Kota Sragen menghadapi sendiri masa revolusi yang sedang terjadi di Indonesia akibat ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Selama masa perjuangan kemerdekaan, muncul pemimpin-pemimpin perjuangan yang mampu memobilisasi kekuatan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap musuh dan mengakibatkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan. Adanya tekanan emosional menjadikan rakyat ikut menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi perjuangan tersebut.

Badan perjuangan daerah Sragen yang paling berpengaruh dalam usaha mendukung anti Swapraja adalah Angkatan Muda Sukawati (AMS). Hampir semua kelaskaran di daerah Sragen tidak ada perbedaan pendapat dalam usaha mendukung GAS. Komite Nasional Indonesia Daerah Sragen mengadakan rapat dalam keinginannya untuk lepas dari ikatan Swapraja. Rapat tersebut dihadiri oleh rakyat, badan-badan perjuangan, dan Lurah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang dibacakan oleh Soehari selaku Ketua Dewan Pekerdja KNI Sragen (Kedaoelatan Rakjat, 4 Mei 1946).

Penyebaran proklamasi yang dilakukan oleh golongan pemuda di daerah-daerah kabupaten, termasuk Kabupaten Sragen, tidak mengalami kesulitan. Secara keseluruhan aksi-aksi revolusioner di daerah dipelopori oleh pejuang-pejuang yang terdiri dari berbagai kelompok pemuda-pemuda pergerakan (pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan), politisi bekas partai-partai politik (partai-partai politik yang pada masa kolonial Belanda aktif

berjuang), bekas pasukan pribumi yang diperbantukan dalam pasukan Jepang, serta kesatuan-kesatuan yang berasal dari Surakarta yang pulang bertugas dari luar Surakarta.

Gerakan anti kraton juga berhasil menekan Pakubuwana XII untuk menerima lagi para pemimpin Barisan Banteng. Pada pertemuan itu para pemimpin Barisan Banteng kembali menuntut kesediaan Pakubuwana XII untuk melepaskan seluruh kekuasaan politiknya. Menyusul kemudian para pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mengirimkan delegasi kepada Susuhunan dan Mangkunegaran untuk menuntut supaya diakhiri Daerah Istimewa itu dan menyatakan bahwa watak ganda dari sistem pemerintahan yang sekarang, yang jalannya tanpa tujuan, dan struktur feodalnya yang usang, tidak dapat lagi diterima oleh semangat penduduk yang revolusioner dan demokratis (Anderson, 1988: 392)

Bentuk dukungan Sragen dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat datangnya kembali pasukan Belanda yang memboncengi Sekutu ditandai dengan pembentukan laskar-laskar. Laskar yang semula berada di Sragen adalah Angkatan Muda Sukawati (AMS). Kegiatan para laskar di Sragen kebanyakan dengan mengirim bantuan berupa sumber pangan dan pasukan ke wilayah-wilayah yang mengalami pertempuran. Kelaskaran di Sragen baru muncul pada awal Oktober 1945. Pada tanggal 2 Februari 1946, didirikan Angkatan Muda Sukawati (AMS). Tujuan didirikannya AMS sebagai bentuk protes terhadap perubahan status Laskar Rakyat, serta ingin melanjutkan cita-cita Laskar Rakyat yang terpaksa mengalami perubahan menjadi kelaskaran berbau politik. Dilakukan sebuah pertemuan untuk mengesahkan berdirinya AMS, yang dihadiri pula oleh mantan anggota Laskar Rakyat yang menolak perubahan status tersebut. Kegiatan yang dilakukan Laskar AMS yaitu, mengirim bantuan ke medan peperangan, menjaga keamanan daerah, menyelenggarakan pendidikan di desa-desa dan membantu memberikan penerangan.

Pergolakan-pergolakan yang terjadi akibat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan identitas barunya juga mengandung permasalahan-permasalahan sosial. Dampak sosial yang dialami masyarakat ditandai dengan

munculnya tindakan kriminalitas karena tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari pada sekelompok orang. Kemudian, adanya kerusakan sarana dan prasarana yang menghambat kegiatan sehari-hari, sampai kepada kebutuhan akan pendidikan yang belum terpenuhi.

### **KESIMPULAN**

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan merupakan suatu babak baru dari sebuah revolusi, yang telah membawa rakyat Indonesia ke dalam suatu masa yang bergolak dalam mencari dan mempertahankan identitas baru. Revolusi yang terjadi membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan-perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di daerah Surakarta berjalan dengan penuh ketegangan dan pertentangan. Dimulai dari setelah proklamasi, Pemerintah Pusat Republik Indonesia menetapkan daerah Surakarta sebagai wilayah Swapraja yang merupakan kelanjutan dari bentuk *Vorstenlanden* pada masa kolonial Belanda.

Pergolakan-pergolakan sosial yang muncul memperlihatkan bahwa revolusi Indonesia tidak hanya merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan identitas barunya tetapi, juga mengandung permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya. Dampak sosial yang dialami masyarakat seperti, banyak muncul kriminalitas di daerah karena tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari, kemudian rusaknya sarana dan prasarana yang menghambat kegiatan sehari-hari masyarakat, sampai kebutuhan akan pendidikan yang belum bisa terpenuhi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderon, Ben. (1988). *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Surakarta: UNS Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Larson, George D. (1990). *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik diSurakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdiyanto. (2013). *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Balai PelestarianNilai Budaya.
- Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Sutarno. (1997). *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam PerjuanganKemerdekaan Tahun 1945-1949: Daerah Kendal dan Salatiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Darmansyah. (1995). *Krisis Pemerintahan Daerah di Surakarta (1945-1950)*. Skripsi Sarjana yang tidak diterbitkan. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.